



KONFLIK UMAT HINDU - MUSLIM DI INDIA ERA PEMERINTAHAN NARENDRA MODI

Bastian Yunariono

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
bastian.yunariono@upnyk.ac.id

Abstrak

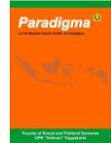
Konflik umat Hindu Muslim di India merupakan konflik yang bersifat sistemik dalam beberapa dekade terakhir. Konflik komunal ini meningkat sejak PM Narendra Modi dari *Bharatiya Janata Party* (BJP) memegang kekuasaan pada tahun 2014. Untuk menjelaskan masalah tersebut penelitian ini menggunakan perspektif komunalisme Surya Prakash Upadhyay dan Rowena Robinson yang menyatakan bahwa masyarakat India dikonstruksikan berdasarkan garis-garis identitas religius yang homogen. Kepentingan ekonomi, sosial dan politik berada dibawah identitas agama. Komunalisme digunakan kelompok elit dan politisi sebagai instrumen untuk mencapai tujuannya Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data-data sekunder. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa konflik umat Hindu Muslim di India meningkat dan bersifat sistemik masa pemerintahan Narendra Modi karena digerakkan oleh kelompok-kelompok kepentingan nasionalisme Hindu seperti RSS yang menghendaki konstruksi India berdasarkan ideologi *Hindutva*. Konflik ini semakin masif akibat agama digunakan politisi BJP sebagai instrumen atau sarana untuk meraih simpati umat Hindu di India.

Kata kunci: *konflik, Hindu-Muslim, komunalisme, Bharatiya Janata Party, Rashtriya Swayamsevak Sangh*

Abstract

The Hindu-Muslim conflict in India has been a systemic conflict in the last few decades. This communal conflict has increased since PM Narendra Modi from the *Bharatiya Janata Party* (BJP) hold power in 2014. To explain this problem this research uses the perspective of communalism Surya Prakash Upadhyay and Rowena Robinson who state that Indian society is constructed based on lines of homogeneous religious identity. Economic, social and political interests are under religious identity. Communalism is used by the elite and politicians as an instrument to achieve their goal. The method used is a qualitative method with secondary data. The results of this study prove that the conflict between Hindu-Muslims in India is systemic because it is driven by Hindu nationalist interest groups such as the RSS which wants the construction of India based on *Hindutva* ideology. This conflict has become more massive as a result of religion being used by BJP politicians as an instrument or means to win sympathy for Hindus in India.





Keywords: *conflict, Hindu - Muslim, communalism, Bharatiya Janata Party, Rashtriya Swayamsevak Sangh*

Pendahuluan

Agenda utama yang umumnya dihadapi negara-negara multietnis adalah problem integrasi nasional. Upaya mewujudkan integrasi nasional merupakan hal kompleks, menyangkut berbagai aspek kehidupan. Berbagai dimensi senantiasa mewarnai nation building seperti bahasa, regionalisme maupun agama. Salah satu negara di kawasan Asia Selatan yang mengalami proses pembangunan negara bangsa adalah India.

India merupakan negara-bangsa yang bersifat heterogen baik dari keragaman bahasa, etnis, regionalisme maupun agama. Keanekaragaman tersebut memberikan karakteristik tersendiri bagi bangsa India. Namun di sisi lain merupakan sumber konflik dan instabilitas yang tak pernah mereda. Masalah integrasi nasional yang dihadapi diantaranya regionalisme dan sparatisme etnik-kebahasaan; kasta; dan sekularisme yang bersumber pada hubungan umat Hindu-Muslim.

Diantara permasalahan di atas, konflik yang paling keras dan bersifat sistemik di India adalah masalah sekularisme atau hubungan umat Hindu-Muslim. Hal ini dibuktikan dengan tingginya intensitas konflik umat Hindu Muslim di India. Dari berbagai data menjelaskan tingginya intensitas konflik umat Hindu Muslim di berbagai wilayah India dalam dekade terakhir. Pada tahun 2015 terjadi puluhan tindakan kekerasan yang dilakukan massa Hindu terhadap minoritas Muslim akibat isu pernikahan pria Muslim dengan wanita Hindu dan pembunuhan sapi. Konflik umat Hindu Muslim pada tahun yang sama adalah penyerangan massa Hindu terhadap umat Muslim di desa Atali di Ballabgarh, Haryana. Mereka menyerang dengan menggunakan tongkat bambu dan besi serta pedang. Konflik yang dipicu perebutan sebuah lahan masjid mengakibatkan 400 umat Muslim kehilangan tempat tinggal serta pengungsian di wilayah tersebut ([http:// The Hindu](http://The Hindu), 30 Mei 2015).

Konflik umat Hindu-Muslim kembali terulang selama bulan Maret 2018 di negara bagian Bihar. Kerusakan berawal ketika berlangsung festival Hindu *Rama Navami* 2018. Beberapa orang tidak dikenal merusak patung Hanuman di sebuah kuil di Nawada. Peristiwa tersebut kemudian mengakibatkan kerusakan selama dua minggu di seperlima wilayah negara bagian Bihar diantaranya di distrik Siwan, Gaya dan Gaya. Sekelompok massa mendatangi pemukiman umat Muslim dan merusak masjid di Rosera, membakar pertokoan dan angkutan umum. Kekerasan komunal ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 65 terluka. Dalam peristiwa ini elit dan simpatisan *Bharatiya Janata Party* (BJP), *RSS Rashtriya Swayamvevak Sangh* (RSS) dan *Bajrang Dal* diduga sebagai penggerak kerusakan (<http://news 18.com>)

Rangkaian kekerasan Hindu Muslim memuncak pada tahun 2020 akibat diberlakukannya UU Kewarganegaraan baru yang dinilai merugikan umat Muslim. UU yang diikuti *National Register of Citizens* (NRC) dirancang pemerintah nasionalis Hindu untuk mengusir umat Muslim yang tidak memiliki dokumentasi kewarganegaraan yang memadai. Umat Muslim melakukan serangkaian demonstrasi yang kemudian dibalas kelompok nasionalisme Hindu yang mendukung kebijakan Pemerintahan Narendra Modi.

Akibatnya pada tanggal 23 Februari 2020 massa Hindu menyerang umat Muslim dengan batu, tongkat dan batang besi di Timur Laut New Delhi. Peristiwa ini menimbulkan pembalasan pemuda Muslim yang menyebabkan seluruh lingkungan Timur Laut New Delhi mengalami





goncangan akibat konflik umat Hindu-Muslim. Sebagian besar dari 53 orang yang terbunuh dan 200 orang terluka adalah Muslim (Ramachandran, 2020).

Konflik umat Hindu-Muslim selanjutnya terjadi sepanjang tahun 2022. Berdasarkan data *Human Rights Watch* sepanjang bulan April 2022 di negara bagian Madya Pradesh terjadi perusakan terhadap belasan rumah dan toko-toko yang sebagian besar dimiliki umat Muslim. Pada bulan Oktober tahun 2022 terjadi kekerasan terhadap 19 orang Muslim dan pembakaran rumah-rumah yang dilakukan oleh kelompok garis keras Hindu. Kelompok-kelompok Hindu garis keras seperti RSS dan *Bajrang Dal* melakukan tindakan kekerasan dengan meneriakkan slogan-slogan anti-Muslim di depan masjid-masjid (*Human Rights Watch*, 2022).

Pada masa pemerintahan M Narendra Modi, pemimpin BJP atau partai nasionalis Hindu, yang berkuasa di India sejak tahun 2014 eskalasi konflik umat Hindu-Muslim meningkat. Tanvir Aejjaz, ahli politik New Delhi University, menyatakan sebagai berikut :

“Religious faultlines have existed in India for a long time but anti-Muslim violence has risen since 2014 under the Hindu nationalist government of Prime Minister Narendra Modi. Communal violence is not a recent phenomenon, but it grows in sync with the strategies of those in power and political mobilisation. The distrust was always there but cleavages have been sharpened now by religious nationalism and ethno-nationalism” (BBC India, 2 September 2021).

“(Garis terpisahnya komunitas agama telah ada di India sejak lama tetapi kekerasan anti-Muslim ini meningkat sejak 2014 di bawah pemerintahan nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi yang berkuasa dan memobilisasi politik. Ketidakpercayaan selalu ada tapi perpecahan kini dipertajam oleh nasionalisme agama dan etno-nasionalisme” (BBC India, 2 September 2021).

Menurutnya terjadi berbagai tindak kekerasan, kebencian dan diskriminasi terhadap umat Muslim. Meskipun kekerasan akibat konflik umat Hindu-Muslim terjadi sejak India merdeka pada tahun 1947 namun pada dekade terakhir meningkat dan dinilai sebagai sesuatu yang “normal” meskipun melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nasionalisme agama yang dipolitisasi menjadi sumber konflik diantara umat beragama terutama umat Hindu-Muslim.

Human Rights Watch menyatakan peristiwa-peristiwa kekerasan umat Hindu-Muslim diatas diidentikkan sebagai wacana politik Hinduisme dari kebijakan Narendra Modi. Dengan berbagai peristiwa terjadinya represi terhadap umat Muslim diasumsikan membawa umat Islam di India ke ambang genosida (*Human Rights Watch*, 2022).

Konflik komunal yang mewarnai kehidupan sehari-hari bangsa India menjadi ujian bagi sekulerisme yang dibangun Jawaharlal Nehru. Masalah Hindu-Muslim merupakan problem tersendiri bagi pemerintah India. Dari komposisi penganut agama di India mayoritas atau sekitar 80% masyarakat India beragama Hindu. Sedangkan umat Muslim di India berjumlah sekitar 14 % penduduk India (Ramachandran, 2020). Namun demikian mereka menuntut dihargai secara layak tidak berada pada posisi perifer. Karena umat Muslim berasumsi meskipun dari segi kuantitas mereka minoritas tetapi sumbangannya terhadap seni, arsitektur, sastra dan politik juga sangat besar,





seperti dalam perjuangan kemerdekaan. Minoritas Muslim India bersama masyarakat keagamaan lain di India adalah bagian integral dalam sistem sosial politik di negeri Hindustan .

Kebijakan diterapkannya sistem sekular tidak berjalan seperti yang diharapkan. Gagasan sekularisme yang dikembangkan Jawaharlal Nehru dengan premis terdapatnya pemisahan antara aspek agama dan kehidupan profan belum terealisasi dengan baik. Konflik-konflik politik berdimensi agama tetap mewarnai kehidupan bangsa India. Primordialisme agama masih merupakan kerangka utama dan ikatan solidaritas hubungan antar individu maupun kelompok di India. Isu agama menguat dalam kehidupan politik, sebagaimana dihembuskan *Bharatiya Janata Party* (BJP) yang kemudian menjelma dalam konflik komunal antara umat Hindu-Muslim. Kerusakan-kerusakan yang terjadi menunjukkan beratnya proses integrasi nasional di India.

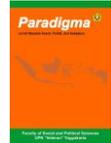
Beberapa kajian menjelaskan konflik Hindu Muslim di India. M. Waqas Sajjad (2018) dalam artikelnya yang berjudul *Examining the State of Muslim Minority under Modi.s BJP since 2014* mengulas tentang kondisi umat Muslim di India masa pemerintahan Narendra Modi. Sajjad berpendapat bahwa umat Muslim semakin termarginalkan dari berbagai aspek pembangunan nasional India. Umat Muslim mengalami berbagai perlakuan diskrimatif dan tindak kekerasan dari kelompok nasionalis Hindu yang didukung secara diam-diam oleh anggota BJP demi mengembangkan ideologi *Hindutva*.

Sedangkan Prashant Waikar (2018) dalam artikel yang berjudul *Reading Islamophobia in Hindutva: an Analysis of Narendra Modi's Political Discourse* membahas narasi-narasi islamphobia atau antagonisme Hindu-Muslim yang diwacanakan Narendra Modi. Berdasarkan analisis wacana terhadap naskah-naskah pidato, wawancara dan podcast, Waikar berpendapat bahwa setelah menjabat Perdana Menteri India, Narendra Modi tetap mewacanakan *Hindutva* yang memandang Muslim sebagai sub-ordinat umat Hindu. Namun demikian narasi-narasi yang dikemukakannya diperhalus dibandingkan era sebelumnya. Narendra Modi menggunakan permainan bahasa untuk meminimalisir dampak negatif dalam bangsa India yang multietnis.

Pengembangan ideologi *Hindutva* tidak hanya di dalam India namun dilakukan kelompok nasionalis Hindu di ranah global. Sitara Thobani (2019) dalam tulisannya *Alt right with the Hindu-right: Long Distance Nationalism and the Pervection of Hindutva* mengulas aktivitas yang dilakukan *Republican Hindu Coalition* (RHC) dalam mempromosikan ideologi *Hindutva*. Dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016, RHC berkolaborasi dengan organisasi *Alternative-Right (Alt-Right)*, organisasi sayap kanan di Amerika Serikat yang berideologi nasionalisme kulit putih, mengkampanyekan Donald Trump. Kedua organisasi ini mendukung Trump yang berpaham cauvinistik kulit putih untuk kemajuan Amerika Serika di masa depan. Terdapat kesamaan ideologi antara RHC dengan *Alt-Right* dimana pentingnya supremasi rasial dikonstruksikan dalam sebuah negara-bangsa multietnis untuk mencapai kemajuan. Kedua organisasi ini juga melihat Islamphobia perlu dinarasikan mengingat di Amerika Serikat terjadi peristiwa 11 September 2001 yang dilakukan kelompok fundamentalis Islam. Isu kelompok fundamentalisme Islam menjadi isu bersama yang dihadapi India dan Amerika Serikat meskipun dalam derajat yang berbeda.

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang menjelaskan hubungan Hindu Muslim dari berbagai perspektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menyebabkan konflik umat Hindu-Muslim di India meningkat di masa pemerintahan PM Narendra Modi. Selama dekade terakhir





intensitas konflik komunal meningkat bahkan dianggap sebagai sesuatu yang “normal” meskipun melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Kerangka Berfikir

Dalam bangsa yang heterogen terdapat potensi lahirnya konflik antar individu maupun kelompok. Konflik disebabkan perbedaan kepentingan dan usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan. Dalam pengertian umum konflik dideskripsikan sebagai benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Menurut Webster istilah konflik berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak (Pritt dan Rubin, 2009:8). Makna konflik kemudian berkembang tidak hanya merujuk konfrontasi fisik tetapi aspek psikologis. Konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan (Liliweri, 2005: 249).

Konflik dalam realita menjadi fenomena berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan. Dalam kasus di India sumber konflik antar individu atau kelompok disebabkan budaya politik komunalisme. Komunalisme berakar dari kebijakan kolonialisme Inggris yang membagi-bagi masyarakat India berdasarkan garis keagamaan. Komunalisme sebagai cara pandang dalam mengkonstruksikan masyarakat India terbagi dalam komunitas-komunitas religius homogen. Setiap komunitas religius memiliki kepentingan sosial, ekonomi dan politik yang berbeda bahkan bertentangan dengan komunitas agama lain. Identitas sosial seperti kelas, wilayah, bahasa dan budaya lainnya diorganisasikan di bawah identitas religius (Bipan Chandra, 1984).

Surya Prakash Upadhyay dan Rowena Robinson (2012) mengemukakan terdapat empat perspektif dalam menganalisis komunalisme yaitu esensialisme, instrumentalisme, konstruktivisme dan institusionalisme. Perspektif esensialisme atau primordialisme melihat bahwa komunalisme disebabkan perbedaan identitas budaya diantara komunitas-komunitas di India. Masing-masing kelompok komunal seperti Hindu dan Muslim, secara alamiah memiliki identitas budaya yang berbeda dalam nilai-nilai, bahasa dan bentuk budaya lainnya. Masing-masing kelompok merupakan komunitas monolitik yang tidak dapat diubah identitas budayanya karena bersifat alamiah atau *taken for granted*. Sehingga terjadinya konflik umat Hindu Muslim di India disebabkan identitas budaya berbeda yang tidak dapat disatukan.

Perspektif konstruktivisme lebih melihat bahwa komunalisme terbentuk bukan semata-mata berdasarkan identitas yang sudah terbentuk sebelumnya tetapi karena masing-masing kelompok komunal menciptakan dan menjaga batasan-batasan budaya yang dipelihara. Mereka melihat kelompok lain sebagai kelompok *the Others* atau si “Liyan” yang berbeda. Kelompok komunal berupaya meminimalisir perpecahan atau pembagian di lingkungan internal untuk menyatukan mereka menjadi kelompok yang lebih luas. Perspektif ini berkembang sebagai implikasi kebijakan administrasi kolonialisme Inggris yang membagi bangsa India dalam kelompok-kelompok religius yang homogen. Dampak lebih lanjut dari kebijakan ini menyebabkan perbedaan dan isu konflik meluas dari wilayah agama ke wilayah sekuler. Dalam perspektif ini komunalisme adalah sistem ideologi atau sistem kepercayaan yang memandang masyarakat dalam kelompok ekonomi, dan politik yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Sedangkan pendekatan institusionalisme menganalisis konflik dan komunalisme dalam perspektif lembaga politik dan ekonomi di India. Kesulitan ekonomi, pembangunan ekonomi yang





lambat dan terbatasnya sumber-sumber daya sebagai latar belakang berkembangnya komunalisme di India. Komunalisme tidak hanya berhubungan dengan masalah ideologi tetapi dibentuk oleh “fungsi persaingan ekonomi” antar komunitas yang keras di lapangan. Dengan demikian agama hanya sebagai atribut dari karakter pembangunan ekonomi dan hubungan sosial yang dihasilkan. Konflik komunal disebabkan persaingan dalam lembaga-lembaga politik dan ekonomi.

Pendekatan instrumentalis melihat bahwa berkembangnya komunalisme akibat digunakannya identitas agama atau budaya oleh pemimpin politik, elit politik dan kelas menengah untuk mencapai tujuannya. Identitas agama menjadi instrumen atau sarana elit atau partai-partai politik untuk meraih kepentingan politik dan ekonomi. Identitas agama dan budaya digunakan seringkali ‘dimanipulasi’ untuk menciptakan solidaritas internal yang menguntungkan kelompok elit. Konflik komunal seperti konflik umat Hindu-Muslim akibat permainan isu-isu identitas agama atau budaya

Berdasarkan klasifikasi komunalisme yang dikemukakan Upadhyay dan Robinson konflik umat Hindu-Muslim di India dianalisis dengan menggunakan perspektif instrumentalisme. Komunalisme atau identitas agama digunakan oleh elit atau politisi untuk mencapai tujuan mereka dalam memenangkan persaingan dengan kelompok atau partai lainnya. Isu-isu agama dikembangkan untuk meraih dukungan umat Hindu yang berimplikasi terjadinya konflik umat Hindu-Muslim bersifat sistemik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian tentang konflik umat Hindu Muslim di India ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Cresswell, 2018: 4). Metode ini berupaya menjelaskan suatu fenomena yang mendalam dengan penggalan data yang komprehensif. Berdasarkan pemahaman tersebut metode kualitatif relevan digunakan dalam penelitian ini sehingga penyebab konflik umat Hindu Muslim di India yang bersifat sistemik dapat dieksplorasi.

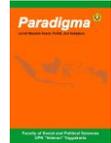
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan (*library research*). Perolehan data bersumber dari buku, jurnal, laporan, majalah dan koran. Sumber lain dari data penelitian berasal dari sumber internet yang kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber tentang penyebab konflik umat Hindu Muslim di India seperti kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik di India.. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa dan menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan. Penyajiannya berupa rangkaian kalimat naratif dan deskriptif yang bersifat analitis.

Hasil dan Pembahasan

Meningkatnya konflik umat Hindu-Muslim di India di era pemerintahan Perdana Menteri Modi dipengaruhi komunalisme atau nasionalisme agama yang mengakar dalam bangsa India. Dalam komunalisme umat Hindu, Muslim, Sikh atau Kristen di India terpola dalam komunitas





agama yang berbeda. Masing-masing komunitas agama memiliki perbedaan kepentingan sekular dan memperjuangkannya berdasarkan damarkasi keagamaan. Komunitas agama ini merupakan sebuah unit sosial, ekonomi dan politik yang memiliki anggota dan kepemimpinan.

Komunalisme dikembangkan oleh kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik yang mengeksploitasi sentimen Hindu untuk memperoleh dukungan suara. Kelompok nasionalis Hindu yang terdiri dari *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS), *Vishva Hindu Parishad*, *Bajrang Dal* dan Bharatiya Janata Party (BJP) disebut sebagai *The Sangh Parivar*. Kelompok ini berupaya mendirikan *Hindu Rashtra* yaitu negara teokrasi India berdasarkan nilai-nilai Hinduisme. Namun demikian *The Sangh Parivar* tidak dapat diidentikkan sebagai organisasi yang murni keagamaan namun lebih ke gerakan politik yang memperjuangkan identitas budaya Hindu di India.

Konstruksi India sebagai negara Hindu merupakan implementasi ideologi *Hindutva* yaitu ideologi India modern yang dibangun berdasarkan Hinduisme. Kehidupan bernegara dan bermasyarakat selaras dengan nilai-nilai budaya Hindu. Ideologi *Hindutva* dikembangkan berdasarkan gagasan bahwa umat Hindu adalah mayoritas dan satu-satunya bangsa India sejati karena *pitrbhu* (tanah air) dan *punyabhu* (tanah suci) mereka berada di India. Sedangkan umat Muslim dan Kristen tidak dapat dianggap sebagai bangsa India karena tanah suci mereka berada di tanah Arab atau Palestina (Ramachandran, 2020).

Dampak dari komunalisme dan misi mewujudkan ideologi *Hindutva* mengakibatkan intensitas konflik umat Hindu-Muslim di India meningkat di era pemerintahan Perdana Menteri Modi. Kaum nasionalisme Hindu yang tergabung dalam RSS dan kelompok kepentingan Hindu lainnya berupaya mendapatkan dukungan masyarakat untuk untuk mewujudkan *Hindu Rashtra*. Disamping itu komunalisme dan *Hindutva* digunakan sebagai sarana atau instrumen politisi BJP untuk mendapatkan simpati pemilih di India yang mayoritas beragama Hindu.

Ideologi *Hindutva* dan *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS)

Berkembangnya komunalisme di India disebabkan hadirnya RSS dan organisasi Hindu lainnya dalam ranah sosial-politik India. Sejak pra-kolonial hingga pascakolonial RSS hendak mewujudkan cita-citanya membentuk negara Hindu. Organisasi Hindu sayap kanan ini dianggap sebagai induk atau organisasi utama organisasi Hindu di India. Meskipun di India terdapat berbagai organisasi komunal Hindu lainnya seperti *Shiv Sena* tetapi organisasi-organisasi Hindu lainnya bersifat regionalitas dan memiliki pengaruh tidak seluas RSS.

Organisasi komunal Hindu sayap kanan ini didirikan oleh Dr. Keshav Balirum Hedgewar, seorang kasta tinggi, pada tahun 1925 di Maharashtra dan Madya Pradesh. RSS dalam istilah lain disebut *National Volunteer Corps* yaitu gerakan komunal Hindu militan yang berjuang mempromosikan nilai-nilai dan kepentingan Hinduisme berdasarkan ajaran Mahabrata dan ajaran Hindu tradisional. Hedgewar hendak menanamkan nasionalisme militan pada penganut Hindu, yang waktu itu dianggap lemah dan pasif dalam menghadapi kekuatan asing seperti Islam dan Inggris. Menurutnya, pemisahan umat Hindu berdasarkan kasta, sekte dan bahasa membuat Hindu lemah terhadap agresi kekuatan asing tersebut.

RSS didirikan untuk mengembangkan sebuah kebudayaan yang monolit dengan nama *Hindu Rashtra*. RSS tidak hanya ingin mengintegrasikan keragaman budaya Hindu tradisional yang ortodoks tetapi juga tradisi agama yang lainnya seperti Sikhs, Budha, Jains dan masyarakat tribal.





Kelompok-kelompok agama tersebut dianggap sebagai bagian dari agama Hindu karena tumbuh dan berkembang pada tanah India (Anderson & Damle, 2019; Juergenmeyer, 1998).

Dalam perkembangannya RSS menjadi inspirator gerakan nasionalisme Hindu lainnya yang tumbuh di India. RSS memiliki jaringan yang tersebar di seluruh wilayah India dengan 5 juta pengikut dan bergerak di seluruh aspek kehidupan. Organisasi pelajar Hindu disebut *Vidyarthi Parishad*, aktivitas perempuan terdapat *Rashtra Sevika Samiti*. Untuk mengkonsolidasikan kaum buruh RSS mendirikan *Bharatiya Mazdoor Sangh*, sedangkan di bidang kebudayaan didirikan *the Itihas aur Sanskrit Parishad* dan *Baratiya Vikasw Parishad*. Organisasi ini bertugas untuk mengembangkan sejarah dan kebudayaan India berdasarkan kepentingan RSS.

Selama bertahun-tahun kegiatan utama RSS terdiri dari pertemuan-pertemuan mingguan dan kemah musim panas yang bertujuan mempertajam ideologi *Hindutva*. Dalam kegiatan-kegiatannya RSS melakukan propaganda dengan menyatakan “..meskipun Hindu komunitas mayoritas di India tetapi tidak diberikan hak-hak yang melekat sebagai kelompok terbesar.” RSS meletakkan pijakan dan merumuskan terma-terma nasionalis Hindu dengan efektif sehingga mereka tetap bertahan sampai sekarang.

Dalam doktrin ideologi *Hindutva*, RSS mewacanakan bahwa nenek moyang bangsa India adalah orang-orang Hindu. Dalam konstitusinya mereka menyerukan seluruh umat Hindu agar menghapus perbedaan-perbedaan dan menyadari “kebesaran masa lalu mereka” dari generasi ke generasi sebagai bangsa Hindu. Agitasi-agitasi yang bersifat chauvinistik Hinduisme menyebabkan RSS memiliki citra di mata publik India sebagai kelompok nasionalis fanatik seperti Nazi di Eropa yang mengagungkan ras dan budaya mereka (Anderson & Damle, 2019).

Untuk mewujudkan supremasi Hindu dan terbentuknya *Hindu Rashtra*, RSS mengabsahkan penggunaan “jalan” kekerasan. Menghadapi potensi terjadinya kekerasan dengan umat beragama lain, RSS melatih kadernya melalui latihan semi militeristik dengan menggunakan tongkat bambu dan kayu. Mereka berlatih menggunakan senjata-senjata yang mematikan tersebut untuk menghadapi kelompok komunal lain seperti umat Muslim yang menjadi minoritas terbesar di India (Ramachandran, 2020).

Namun demikian RSS sendiri bukanlah kelompok religius meskipun mereka memakai retorika Hindu. Para pemimpinnya tidak semuanya pendeta, orang suci ataupun pemimpin Hindu tradisional lainnya. Begitu pula sebagian anggota seniornya bukan penganut Hindu yang tulus. Tetapi mereka semua meyakini bahwa kepercayaan Hindu adalah kunci untuk membangkitkan nasionalisme India.

Untuk menetapkan prinsip-prinsip yang abadi RSS menggunakan ideologi tidak mengakui komposisi adanya keragaman agama dan budaya di India yang setara namun bersifat hirarkis. Bangsa Hindu yang seragam berada dalam puncak struktur masyarakat sementara umat Kristen, Islam dan Yahudi berada di lapisan bawah (Buck, 2017).

Kaum nasional Hindu berpendapat bahwa seseorang belum sempurna menjadi bagian dari bangsa India jika dia belum menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Hinduisme bahkan dianggap sebagai orang asing (*foreigner*). Terdapat dua cara kelompok agama lain seperti umat Muslim dan Kristen atau lainnya dapat diterima menjadi bangsa India sejati. Cara pertama adalah komunitas non-Hindu harus meleburkan identitas mereka kedalam tradisi budaya Hindu. Mereka harus menggunakan identitas Hindu dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun





demikian jika kelompok non-Hindu ini menolak meleburkan identitasnya berdasarkan Hinduisme maka cara kedua dilakukan, yaitu menempatkan mereka berada di bawah atau menjadi sub-ordinat bangsa Hindu (Anderson & Damle, 2019).

RSS berpendapat perlunya dibangun superioritas Hindu di masa kini dan masa depan. Terdapat perbedaan antara Hindu dengan identitas lain, seperti Yahudi, Kristen dan Islam. Kelompok minoritas ini tidak layak menjadi bagian dari India. Namun demikian diantara keragaman identitas dan kelompok di India, RSS memandang Islam atau Muslim sebagai kekuatan asing yang melakukan invasi dan peperangan sehingga mengakibatkan seismik demografi umat Hindu di Anak Benua (Waikar, 2018).

RSS menggerakkan kebencian terhadap orang Muslim sebagai kelompok minoritas terbesar dan umat Muslim dianggap sebagai agresor, pengkhianat dan teroris. Organisasi ini melihat bahwa Islam merupakan ancaman serius bagi terbantuknya *Hindu Rashtra* mengingat jumlah mereka yang cukup besar (Anderson & Damle, 2019)

RSS secara intensif melakukan agitasi rasialis kepada masyarakat India mengenai *Islamophobia*. Narasi-narasi bersifat kebencian terhadap umat Muslim dibangun RSS dan kelompok nasionalisme Hindu lainnya. Isu yang dibangun melalui romantisme bangsa India. Mereka memvisualisasikan masa-masa keemasan peradaban Hindu masa lalu. India menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi, politik dan budaya global (Ramachandran, 2020).

Namun demikian masa-masa keemasan peradaban Hindu mengalami kemunduran akibat invasi umat Muslim ke India pada abad ke-12. Terjadi konflik antara umat Hindu – Muslim sebagaimana perlawanan Rajput Prithviraj Chauhan melawan Sultan Muhammad Ghaur pada abad ke-12. Pertempuran lainnya terjadi antara Rajput Maharana Pratap melawan Mughol Akbar pada abad ke-16. Pada konflik ini kaisar Mughal merusak kuil tempat lahirnya Dewa Rama di Ayodya pada tahun 1528 M dan menggantinya dengan sebuah masjid (Ramachandran, 2020).

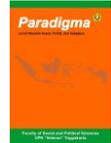
Bagi kelompok nasionalisme Hindu makna kuil memiliki berbagai simbolisasi yaitu sebagai simbol identitas keagamaan, kekuatan politik dan ekonomi. Dari dimensi keagamaan kuil merupakan tempat ibadah umat Hindu yang sakral. Dari dimensi politis kuil menandakan kontrol kekuasaan politis atas wilayah tersebut. Sedangkan dari dimensi ekonomi makna kuil sebagai fasilitas penyimpanan kekayaan (Waikar, 2018).

Meskipun umat Hindu sebagai masyarakat ‘pribumi’ menentang perusakan dan perampasan tempat ibadah, simbol kekuatan politik dan teritori serta terkait aset kekayaan umat Hindu namun mereka mengalami kekalahan dari invasi umat Muslim sebagai kelompok “asing.” Dalam skala lebih lanjut umat Hindu dipaksa untuk melakukan konversi agama menjadi penganut Islam.

Melalui rehistorisasi konflik-konflik yang bersifat endemik antara umat Hindu yang diilustrasikan sebagai wujud keberanian masyarakat pribumi Hindu dengan invasi Muslim yang diidentikkan sebagai barbarisme dan kejahatan. Melalui narasi antagonisme tokoh-tokoh RSS mereproduksi norma-norma dan keyakinan Hinduisme yang positif sementara Islam diidentikkan sebagai sesuatu yang negatif.

Umat Hindu masa kini sebagai pewaris peradaban Hindu di masa lalu berkewajiban kembali menuntut dominasi peradaban Hindu karena bangsa India identik dengan bangsa Hindu (Waikar, 2018). Hinduisme menjadi visi masa depan India yang modern. Untuk mewujudkan misi





masa depan India modern peradaban Hindu harus diraih dengan perjuangan dan umat beragama lain seperti Islam atau Kristen disubordinasikan di bawah Hinduisme.

Isu lain yang dikembangkan RSS dalam mengembangkan Islamphobia adalah wacana 'Jihad Cinta'. Konsep 'Jihad Cinta' adalah skema di mana laki-laki Muslim yang pada awalnya seringkali menyembunyikan identitas agama mereka dan menggunakan taktik rayuan kontemporer untuk memikat perempuan Hindu. Mereka menikah dan memaksa pasangan hidupnya berpindah agama, melahirkan banyak anak serta mendidik mereka sesuai ajaran Islam. Dalam dekade terakhir istilah 'Jihad Cinta' menjadi ungkapan yang paling sering diungkapkan kaum nasionalis Hindu RSS dan organisasi Hinduisme lainnya berpendapat bahwa Jihad Cinta sebagai instrumen baru gerakan islamisasi India. Bahkan kelompok nasionalisme Hindu ini memperluas makna konsep Jihad Cinta sebagai "terorisme" melalui cara rayuan dan pernikahan di bawah kepura-puraan cinta ((Iwanek, 2016, Frydenlund, 2022).

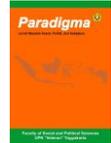
RSS dan organisasi nasionalis Hindu lainnya menyatakan bahwa umat Muslim India berkonspirasi untuk meningkatkan populasi mereka dengan memikat perempuan pernikahan Hindu yang kurang memahami tradisi Hindu dengan mengkonversi agama mereka menjadi Muslim. Penggunaan media sosial yang masif seperti *facebook*, *twitter*, *whatsApp* menjadi sarana pemuda Muslim memikat perempuan Hindu yang liberal. Disisi lain dalam tradisi Hindu adanya aturan yang ketat antar kasta dan mahar yang harus dibayar pihak perempuan menjadi faktor pendukung terjadinya pernikahan lintas agama seperti umat Hindu dan Muslim.

Isu 'Jihad Cinta' dimobilisasi RSS beserta organisasi nasionalisme Hindu lainnya seperti *Visva Hindu Parishad (VHP)*, *Bajrang Dal*, *Vishva Sanatan Sangha*, *Vanvasi Kalyan*, *Rajput Youth* dan BJP. Meskipun dalam investigasi tidak ada perubahan signifikan terhadap populasi umat Hindu, tetapi isu Jihad Cinta dimobilisasi yang melahirkan kekerasan terhadap umat Muslim. Pada bulan September 2022 pria Muslim yang berusia 24 tahun dari negara bagian Karnataka di India Selatan dibunuh untuk "menyelamatkan" perempuan Hindu dari upaya pemuda Muslim menikahi perempuan Hindu (the Guardian.com, 20 September 2022). Selanjutnya, selama bulan November 2022 organisasi nasionalis atau fundamentalis Hindu melakukan demonstrasi anti-Jihad Cinta di Maharashtra yang melibatkan sekitar 10.000-12.000 orang. Mereka meneriakkan kebencian komunal untuk memboikot produk dan toko-toko umat Muslim (Indian Express.com, 5 Februari 2023).

Stereotipe negatif terhadap umat Muslim dalam permainan 'Jihad Cinta' meletakkan landasan kekerasan bagi RSS dan organisasi nasionalisme Hindu lainnya. Kekerasan-kekerasan yang disebabkan isu 'Jihad Cinta' mengakibatkan ketakutan dan polarisasi masyarakat India lebih sistemik dalam damarkasi Hindu-Muslim sebagai identitas yang berbeda dan bersifat antagonis. Kekerasan yang terjadi membuktikan konstruksi negara sekuler dan demokrasi yang menjadi landasan bernegara India tidak mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. RSS dengan slogan *Hindu Rashtra* seringkali mengabaikan jalan damai demi mewujudkan misi yang tertuang dalam ideologi *Hindutva*. Antagonisme Hindu-Muslim dan ideologi kekerasan menjadi wacana keseharian yang sulit terelakkan.

Disamping peranan kelompok kepentingan seperti RSS, sejak dekade 2010 'Jihad Cinta' menjadi isu yang rentan dieksploitasi para politisi. Hal ini terbukti di negara bagian Uttar Pradesh yang dikuasai BJP bahwa isu 'Jihad Cinta' menjadi sumber konflik sehari-hari di negara bagian tersebut. Yogi Adinath, Ketua Menteri BJP Uttar Pradesh, secara efektif menggunakan isu 'Jihad





Cinta' untuk mengkonstruksi antagonisme masyarakat Hindu terhadap umat Muslim demi meningkatkan popularitas BJP (Nielsen and Nelsen, 2021). Isu 'Jihad Cinta' menjadi sarana politisi untuk memobilisasi massa demi kepentingan mereka mendapatkan suara dalam pemilu.

Bharatiya Janata Party dalam Konflik Umat Hindu - Muslim

Dimensi lain yang mempengaruhi intensitas konflik umat Hindu-Muslim di India adalah keberadaan partai-partai politik yang menggunakan *platform Hindutva* untuk mendapatkan dukungan masyarakat India yang mayoritas beragama Hindu. Partai-partai politik yang berideologi nasionalisme agama tersebut mengeksploitasi sentimen identitas agama untuk memperoleh simpati pemilih (Sajjad, 2018).

Dalam sejarah politik India modern beberapa partai politik yang mengeksploitasi sentimen Hinduisme diantaranya Partai Bharatiya Jana Sangh (PBJS). Partai yang berdiri pada tahun 1951 tersebut merupakan sayap politik RSS. Para pemimpin PBJS seperti SP Mukherjee berupaya membangun kembali negara India modern berdasarkan budaya Hindu untuk merealisasikan konsep *Hindu Rashtra*.

Pada dekade 1950-an hingga 1990-an dalam setiap pemilu PBJS bersaing dengan Partai Kongres India yang berideologi sekuler. Dalam ideologi sekuler yang dianut Partai Kongres mengemban misi memisahkan kehidupan politik dari unsur-unsur agama sehingga dampak negatif komunalisme dapat diminimalisir dari kehidupan bangsa India. Partai Kongres mendominasi pemerintahan di India pada awal kemerdekaan hingga dekade 1990an. Partai Kongres identik dengan dinasti Nehru-Gandhi karena pemimpin partai berasal dari keluarga Jawaharlal Nehru yang berideologi sekuler. Dengan demikian pemilu di India pasca kemerdekaan pada hakikatnya merupakan persaingan dua ideologi kepartaian yaitu nasionalisme agama (Hinduisme) dan nasionalisme sekuler.

Setelah pengaruh BPJS mengalami penurunan pada dekade 1980-an, sentimen Hinduisme dalam sistem kepartaian di India ini dilanjutkan dengan hadirnya *Bharatiya Janata Party* (BJP) pada tahun 1980. Sebagaimana berdirinya BPJS, hadirnya BJP dalam politik di India berasal dari inisiatif tokoh-tokoh RSS yang menghendaki konstruksi India sebagai *Hindu Rashtra* yang berasaskan ideologi *Hindutva* (Sajjad, 2018).

Pada awal berdirinya kekuatan BJP hanya didukung kasta atas dan menengah yang jumlahnya tidak begitu besar. Pada pemilu pertama yang diikutinya di tahun 1984 BJP hanya memenangkan 2 kursi dari 545 kursi parlemen kemudian meningkat menjadi 86 kursi pada pemilu 1989. Peningkatan perolehan suara terus berkembang pada pemilu 1991 BJP memenangkan 120 kursi. Pada pemilu 1996 BJP memperoleh 160 kursi jika digabungkan dengan koalisinya mendapatkan 195 kursi parlemen. Untuk pertama kalinya BJP dan koalisinya memenangkan pemilu di India. Kemudian pada pemilu 1998 dan 1999 memenangkan 180 kursi dan 249 kursi (Mashad, 1998).

Pada pemilu tahun 2004 dan 2009 BJP mengalami kekalahan dari Partai Kongres yang berideologi sekuler. Pada pemilu tahun 2004 BJP mendapatkan 138 kursi, sedangkan Partai Kongres mendapatkan 145 suara dari 545 kursi yang diperebutkan. Pada 2009 BJP mendapatkan 116 kursi sehingga mengalami kekalahan dari Partai Kongres dengan meraih 206 kursi parlemen.





Selanjutnya BJP meraih kemenangan kembali pada pemilu 2014 BJP dengan mendapatkan 282 kursi dari 543 kursi parlemen. Kemenangan mutlak PJB terjadi pada pemilu 2019 dengan memperoleh 303 dari 543 kursi parlemen. Kemenangan pada pemilu ini menjadi prestasi PJB dalam perpolitikan di India (BBC, 2019).

Kemenangan PJB pada dua pemilu terakhir dipengaruhi kemampuan BJP dalam menggunakan isu-isu Hinduisme. Meskipun dalam retorikanya BJP memproklamirkan sebagai partai yang mewakili seluruh bangsa India tetapi dalam implementasinya membuktikan kesetiiaannya hanya kepada “bangsa” Hindu. Dari peristiwa kemenangan dalam dua pemilu terakhir BJP mendapat keuntungan dengan menggunakan isu *Hindutva* yang bersemboyan “India adalah bangsa Hindu.” Ideologi ini menarik simpati pemilih terutama kaum nasionalisme Hindu (Sajjad, 2018).

Terdapat beberapa penyebab meningkatnya perolehan suara BJP yang berbasis ideologi keagamaan melawan dominasi Kongres yang berideologi sekular. Tidak terdapatnya tokoh kharismatik keluarga Nehru dalam kepemimpinan Partai Kongres serta tingginya tingkat korupsi di India ketika Partai Kongres berkuasa menyebabkan menurunnya popularitas partai tersebut. Di sisi lain BJP berhasil mengeksploitasi sentimen keagamaan uniat Hindu yang merupakan mayoritas penduduk India.

BJP berupaya meningkatkan popularitas partainya dengan menggunakan ideologi nasionalisme Hindu dan beraliansi dengan gerakan-gerakan yang menuntut didirikannya *Hindu Rashtra* seperti RSS dan *Shiv Sena*. BJP menjanjikan Hindu sebagai identitas budaya India. Agama dan komunalisme Hindu digunakan BJP untuk memobilisasi dukungan. Agama secara sistematis digunakan sebagai instrumen untuk melakukan konsolidasi pemilih Hindu.

Dalam pemilu 1991 BJP menggunakan isu “*Mandir* (kuil) Dewa Rama, Roti dan Keadilan” sebagai tema kampanye nasional. Dengan isu Dewa Rama BJP berupaya mendirikan sebuah kuil Hindu di atas tanah yang sekarang berdiri Masjid Babri di Ayodhya suatu wilayah dari negara bagian Uttar Pradesh. Dalam kampanyenya BJP menekankan mitos bahwa di tanah masjid tersebut sebelumnya adalah tempat kelahiran Dewa Rama. Namun penguasa Islam Moghul membongkar kuil Rama dan diganti dengan Masjid Babri yang berdiri sekarang (Mashad, 1998; Sajjad, 2018).

Pimpinan BJP, Lal Khrisna Advani, mengadakan kampanye nasional untuk mendukung gerakan pembangunan kembali kuil Rama di Ayodhya. BJP berkoalisi dengan *Bahujan Samaj Party* (BSP) yaitu suatu partai fundamentalis Hindu untuk membangkitkan kesadaran kelompok Hindu. Mereka berusaha menarik simpati dengan membangun popularitasnya melalui kampanye besar-besaran untuk membangun sebuah kuil. Dari Ayodhya partai-partai ini melancarkan kampanye besar-besaran untuk menggali keberhasilan politis.

Rencana masyarakat Hindu ini mendapat tantangan dari umat Muslim. Mereka berpendapat bahwa Masjid Babri adalah simbol dari pengembangan peradaban Islam di India. Jika Masjid Babri runtuh akan berdampak pada runtuhnya masjid-masjid lain yang ada di India. Lebih jauh hal ini akan berimplikasi pada hilangnya umat Muslim di India.

Konflik ini kemudian berkembang menjadi kerusuhan komunal yang menewaskan lebih dari 2.000 umat Muslim dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Kerusuhan komunal digerakkan oleh RSS, VHP dan BJP dengan memobilisasi sukarelawan Hindu dari seluruh negeri untuk berkumpul di Ayodhya. Kelompok nasionalisme Hindu mengeksploitasi sentimen agama Hindu untuk mendirikan sebuah negara teokratis dan eksklusif. Kekerasan yang terjadi pada saat





Narendra Modi menjadi Ketua Menteri di Negara Bagian Gujarat. Kelompok nasionalisme Hindu leluasa melakukan agitasi kerusuhan rasialis akibat dukungan implisit dan eksplisit dari pejabat BJP yang berkuasa (Sajjad, 2018).

Meskipun secara arkelogis tidak terdapat bukti-bukti yang menunjang apa yang diklaim BJP, RSS dan VHP. Dalam catatan sejarah tidak terdapat keterangan yang pasti tentang tempat kelahiran Rama namun asumsi ini sulit diterima para pendukung BJP dan anggota *the Sang Parivar*. Konsepsi populer tentang masa lalu dipolitisasi melalui penyampaian mitos-mitos yang dianggap sebagai kebenaran sejarah.

Dari peristiwa tersebut membuktikan masalah agama digunakan untuk kepentingan politik. Para politisi mengambil keuntungan dengan memobilisasi umatnya untuk kepentingan mereka. BJP mengeksploitasi sentimen agama Hindu untuk meningkatkan popularitasnya terhadap umat Hindu di India.

Penggunaan isu sentimen agama kembali dieksploitasi oleh para politisi BJP satu dekade kemudian. Pada tahun 2002 kembali terjadi kerusuhan rasial yang cukup tragis di Gujarat. BJP dan partai-partai Hindu lainnya berupaya memprovokasi kemarahan umat Muslim dengan menyerang penumpang kereta api yang beragama Islam. Umat Muslim yang tidak menyadari strategi ini kemudian membalas dengan membakar satu gerbong kereta api yang memuat peziarah Hindu. Peristiwa ini mengakibatkan sekitar 50 orang meninggal dunia. Peristiwa ini kemudian menimbulkan konflik umat Hindu-Muslim di seluruh Gujarat. Reaksi Anti-Muslim massa Hindu akhirnya mengundang simpati para pemilih Hindu yang menyebabkan BJP memperoleh sejumlah kemenangan besar dalam pemilu di Gujarat (Mashad, 1998).

Isu agama lain yang intensif digunakan BJP untuk meningkatkan popularitasnya adalah dengan menggunakan isu politik perlindungan sapi. Bagi umat Hindu sapi adalah hewan suci yang menjadi identitas budaya Hindu. Bahkan sebagian umat Hindu menganggap sapi sebagai “ibu” dari bangsa India. Gyan Dev Ahuja, anggota parlemen BJP dari Rajasthan, menyatakan sebagai berikut:

“Hanya ada satu cara untuk melindungi budaya India: melindungi *gau* (sapi), Gangga, dan (dewi) Gayatri...Hanya komunitas yang dapat melindungi warisan ini yang akan bertahan. Jika tidak, akan terjadi krisis identitas yang sangat besar, dan krisis identitas ini akan membahayakan keberadaan kita (umat Hindu) (*Human Rights Watch*, 2018).”

Disisi lain bagi umat Muslim sapi adalah hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi dagingnya dan kulitnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun perlindungan sapi terkait dengan umat agama lain dan kaum Dalit atau kasta rendah namun umat Muslim dianggap sebagai pelaku utama bisnis sapi di India. Dalam kehidupan sosial-ekonomi India umat Muslim diidentikkan dengan bisnis sapi, daging sapi dan kulit sapi. Rumah-rumah pematangan hewan diasosiasikan dengan ladang bisnis umat Muslim (Rahman, 2017).

Dampak perbedaan pandangan mengenai kesucian sapi dan stigma umat Muslim sebagai pelaku bisnis sapi menyebabkan mereka diserang oleh massa Hindu atas nama kesucian dan keselamatan sapi. Pada tahun 2010 hingga 2017 terjadi 63 insiden kekerasan akibat isu sapi, 86% korbannya adalah umat Muslim. *Human Rights Watch* menjelaskan bahwa antara bulan Mei 2015





hingga Desember 2018, terdapat 44 orang tewas, 36 di antaranya Muslim; sedangkan orang yang terluka sebanyak 280 orang (Rahman, 2017; *Human Rights Watch*, 2018).

Sudha Ramachandran mengemukakan bahwa isu politik perlindungan sapi sebagai isu “demonisasi” yang membentuk stigma negatif terhadap umat Muslim. Umat Hindu menganggap sapi sebagai *gau mata* (ibu universal). Sejak akhir abad ke-19, sapi muncul sebagai simbol nasionalisme Hindu dan sentra pertemuan umat Hindu melawan umat Muslim. Aktivis Hindutva seperti tokoh-tokoh BJP membenarkan tindakan kekerasan perlindungan sapi sebagai “tugas suci” untuk melindungi budaya Hindu (Ramachandran, 2020).

Kekerasan terhadap umat Muslim dilakukan oleh *Vigilante*, kelompok perlindungan sapi yang berkembang di seluruh negara bagian India. Kelompok *Vigilante* ini berafiliasi dengan kaum nasionalisme Hindu serta didukung oleh politisi BJP. Para politisi BJP membuat berbagai pernyataan perlunya perlindungan sapi sebagai upaya menarik simpati pemilih Hindu yang bermuara terjadinya kekerasan komunal antara umat Hindu dan Muslim.

Isu politik sapi dan tindak kekerasan yang diprovokasi politisi PJB terungkap sebagaimana pernyataan Sakshi Maharaj, anggota parlemen BJP pada Oktober 2015. Maharaj menyatakan “Kami tidak akan tinggal diam jika ada yang mencoba membunuh ibu kami. Kami siap untuk membunuh dan dibunuh.” Pernyataan politisi PJB tersebut berpotensi menjadi pemicu masifnya konflik komunal antara umat Hindu dan Muslim di India (*Human Rights Watch*, 2019).

Isu politik perlindungan sapi menjadi salah satu sumber utama kekerasan komunal di India meningkat menjelang hari-hari besar keagamaan umat Muslim seperti perayaan Hari Raya Idul Adha atau perayaan Umat Hindu seperti kelahiran Dewa Rama. Dalam berbagai kasus tersebut Narendra Modi dan politisi BJP dinilai memihak dan membiarkan tindakan kekerasan terkait isu sapi untuk mendapatkan simpati umat Hindu.

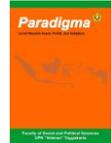
Kekerasan terhadap umat Muslim terkait isu politik sapi menjadi sesuatu yang dianggap “normal” dalam masyarakat India. Aparat negara seperti kepolisian dinilai tidak serius dalam menyelesaikan kekerasan yang menimpa umat Muslim terkait isu sapi. Dalam berbagai kasus Polisi dinilai bersikap tidak transparan dengan menghentikan penyelidikan, mengabaikan prosedur, terlibat dalam pembunuhan atau menutupi kejahatan.

Kekerasan dengan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Narendra Modi yang mengalami peningkatan eskalasi sejak partainya berkuasa mendapat kritik berbagai pihak. *The Alliance for Justice and Accountability*, sebuah lembaga hak asasi manusia di India menyatakan sebagai berikut.

“The victory of the BJP in India’s national elections in May 2014 brought to power a party that has openly espoused Hindutva, an ultranationalist ideology marked by extreme animosity toward Muslims, Christians and other religious minorities. While votaries of Hindutva are actually a minority among Hindus, the BJP rode to power on promises of inclusive development, while also satisfying their core base of Hindu supremacists led by the RSS and its many affiliates. The result, over the last three years only, can only be termed as an assault on human rights and religious freedom of minorities that is shocking both in its intensity and its brazenness” (Sajjad, 2018).

“(Kemenangan BJP dalam pemilu nasional India pada Mei 2014 membawa tampuk kekuasaan sebuah partai yang secara terbuka mendukung *Hindutva*, sebuah





ideologi ultranasionalis yang ditandai dengan kebencian ekstrim terhadap Muslim, Kristen dan agama minoritas lainnya. Sebenarnya pemilih Hindutva minoritas diantara umat Hindu. BJP berkuasa dengan janji pembangunan inklusif, sementara juga memuaskan basis inti supremasi Hindu mereka yang dipimpin RSS dan banyak afliasinya. Hasilnya selama tiga tahun terakhir, hanya bisa disebut serangan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama minoritas yang mengejutkan baik dalam intensitas maupun keberaniannya” (Sajjad, 2018).

The Alliance for Justice and Accountability berpendapat bahwa kekerasan terhadap kelompok minoritas meningkat sejak pemerintahan India dikuasai BJP pada tahun 2014. Kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti umat Muslim merupakan proses berkelanjutan sepanjang BJP mengadopsi ideologi *Hindutva* yang memarginalkan kelompok agama lain. Pendapat yang dikemukakan lembaga HAM tersebut menjadi realita. Pada tahun 2019, BJP memenangkan kembali pemilu India dan konflik komunal terus berkembang hingga tahun 2023. Meskipun kelompok nasionalisme Hindu minoritas diantara umat Hindu India namun mereka intensif beraliansi dengan politisi BJP menggerakkan kebencian komunal. Kebencian komunal mengakibatkan terpolarisasinya bangsa India yang berujung pada kekerasan mayoritas terhadap minoritas.

Berdasarkan berbagai peristiwa bahwa terjadinya konflik umat Hindu Muslim di India digerakkan oleh politisi BJP. Mereka menggunakan berbagai isu keagamaan yang bersifat klasik dan kontemporer sebagai sarana atau instrumen mendapat keuntungan. Isu yang bersifat klasik seperti isu perlindungan terhadap situs-situs keagamaan dan penghormatan terhadap simbol-simbol keagamaan. Perlindungan terhadap situs-situs keagamaan dibuktikan dengan peristiwa Ayodya dimana Narendra Modi menjadi Ketua Menteri di wilayah tersebut. Isu klasik lainnya yang digunakan politisi BJP untuk mendapatkan keuntungan adalah isu perlindungan sapi yang dianggap sebagai dewa atau Ibu bangsa Hindu. Sedangkan isu kontemporer yang dinarasikan politisi BJP bersama elit RSS adalah ‘Jihad Cinta.’ Meskipun tidak terdapat perubahan demografis perubahan signifikan perubahan komposisi umat beragama di India namun isu tersebut dieksploitasi politisi atau elit BJP untuk mendapatkan simpati pemilih yang bermuara pada terjadinya konflik komunal di berbagai wilayah India.

Untuk mendapatkan simpati pemilih Hindu dua pola yang digunakan politisi BJP. Pola pertama mereka menggerakkan kebencian terhadap umat Muslim melalui narasi-narasi yang dikemukakan secara terbuka seperti umat Muslim sebagai pihak asing yang menjadi ancaman terwujudnya *Hindu Rastra*. Pola kedua, adalah politisi atau elit BJP memberikan perlindungan secara diam-diam (*silently supporting*) terhadap pelaku kekerasan sehingga mereka terbebas atau berkurangnya sanksi hukum. Akibat diterapkannya pola-pola ini mengakibatkan konflik komunal umat Hindu-Muslim di India mengalami peningkatan masa pemerintahan Narendra Modi. Para politisi mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi isu-isu agama untuk meningkatkan popularitasnya demi meraih kemenangan dalam pemilu.

Penutup

Meningkatnya konflik umat Hindu Muslim di India disebabkan budaya politik komunalisme atau nasionalisme agama yang dikembangkan kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik yang tergabung dalam *the Sangh Parivar*. Kelompok-kelompok kepentingan seperti RSS yang berpaham nasionalisme Hindu menghendaki terbentuknya konstruksi India modern sebagai negara





Hindu atau *Hindu Rashtra* sebagai implementasi ideologi *Hindutva*. Sebagai agama mayoritas bangsa India, kelompok-kelompok kepentingan ini menghendaki Hinduisme menjadi dasar bernegara India.

Isu sentimen Hinduisme semakin masif dengan hadirnya partai-partai politik seperti BJP yang mengusung ideologi *Hindutva*. Untuk mendapatkan simpati pemilih BJP menggunakan identitas agama sebagai sarana untuk meraih dukungan suara umat Hindu. Partai nasionalisme Hindu tersebut mengkampanyekan pentingnya menjaga budaya Hindu seperti penghormatan terhadap dewa, kuil-kuil Hindu dan perlindungan sapi. Isu-isu komunal tersebut bermuara terjadinya konflik umat Hindu-Muslim di India.

Gagasan sekulerisme atau terpisahnya kehidupan agama dari kehidupan profan sebagaimana dicita-citakan Jawaharlal Nehru yang tertuang dalam konstitusi belum terealisasi. Komunalisme masih menjadi sentral dalam kehidupan sehari-hari bangsa India. Kemajuan bangsa India dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan modern yang berpijak pada rasionalitas belum melepaskan mereka dari dogma-dogma agama yang dipolitisir untuk kepentingan politik. Berkelindannya agama dan kehidupan profan membuktikan beban berat integrasi nasional yang dihadapi India sebagai bangsa multikultur.

Daftar Pustaka

- Anderson, Walter & Shridhar D. Damle. (2019). Messengers of Hindu nationalism: How the RSS reshaped India. *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 45(5), 943–944. doi : <https://doi.org/10.1080/00856401.2022.2067387>
- Buck, Jesse. (2017). The word's best minority: Persis and hindutva's ethnic nationalism in India. *Ethnic and Racial Studies* 40 (15), 2806-2828. doi: <https://doi.org/10.1080/01419870.2016.1259492>.
- Chandra, Bipan Chandra. (1984). *Communalism in Modern India*. New Delhi: Vani Educational Books.
- Creswell, John W. 2018. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. (Achmad Fawaid dan Rianayati KP, Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ellis, Hannah, Petersen and Ahmer Khan, "They cut him into pieces: India's 'love jihad' conspiracy theory turns lethal," <https://www.theguardian.com/world/2022/jan/21/they-cut-him-into-pieces-indias-love-jihad-conspiracy-theory-turns-lethal>.





Frydenlund, Oselin and Eviane Leidig. (2022). Love jihad : Sexuality, reproduction and the construction of the predatory muslim male. *Religious*, 13 (201). doi: doi.org/10.3390/rel13030201. Diunduh dari <https://www.mdpi.com/journal/religions>.

Human Rights Watch. (2019). *Violent Cow Protection in India: Vigilante Groups Attack Minorities*. Diunduh dari <https://www.hrw.org/report/2019/02/19/violent-cow-protection-india/vigilante-groups-attack-minorities>.

_____ . (2022). *India: Surge in Summary Punishments of Muslims*. Diunduh dari <https://www.hrw.org/news/2022/10/07/india-surge-summary-punishments-muslims>.

Hargrave Jr., Robert L. Jr. dan Stanley A. Kachoneck. (1993). *India: Government and Politics in a Developing Nation*. Texas : Harcourt Brace Javanovich.

Iwanek, Krzysztof. (2016). Love jihad and the stereotypes of muslims in Hindu nationalism. *Journal of Alternative Perspective in the Social Science*, 7 (3): 355-359.

Juergenmayer, Mark. (1993). *Menentang Negara Sekuler: Kebangkitan Nasionalisme Agama*. (Noorhadi, Terjemahan). Jakarta: Mizan, Jakarta.

Liliwari, Alo. (2005). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS.

Mashad, Dhororudin. (1998). *Agama dalam Kemelut Politik : Dilema Sekularisme India*, Jakarta: CIDES.

MS, Eeshanpriya & Shubhangi Khapre. (2023, 19 June). With BJP leaders in attendance, Hindu outfits hold rallies on ‘love jihad’, ‘forced conversion’. Diunduh dari <https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/mumbai-hundreds-march-love-jihad-laws-religious-conversion-8411289/>.

Nielsen, Kenneth Bo and Alf Gulvald Nilsen. (2021). Love jihad and the governance of gender and intimacy in Hindu nationalist statecraft, *Religions* 12(12): 1-18. doi: 10.3390/rel12121068. Diunduh dari <https://www.mdpi.com/2077-1444/12/12/1068>.





- NPR (2019), “The powerful group shaping the rise of Hindu nationalism in India,”
<https://www.npr.org/2019/05/03/706808616/the-powerful-group-shaping-the-rise-of-hindu-nationalism-in-india>.
- Pruitt, Deang G dan Jeffrey Z. Rubin (2004). *Teori Konflik Sosial* (Diterjemahkan oleh Helly P. Soejipto dan Sri Mulyani P). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Puthiyakath, Hisham Ul Wahab. (2020). A war of narratives: Understanding 2020 Delhi violence in India. Diunduh dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3821421
- The British Broadcasting Corporation (BBC). (2019, 24 May). India General Election. Diunduh dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48366944>.
- The British Broadcasting Corporation (BBC). New Delhi. (2021, 2 September). Beaten and humiliated by Hindu mobs for being a muslim in India. Diunduh dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-58406194>.
- The Guardian. (2022, 20 September). What is Hindu nationalism and how does it relate to trouble in Leicester? Hindutva is the predominant form in India and has been associated with rightwing extremism. Diunduh dari <https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/what-is-hindu-nationalism-and-who-are-the-rss>.
- The Hindus. (2015, 30 May). Another disputed mosque sparks Ballabgarh riots: Monday’s attacks caught local Muslims by surprise. Diunduh dari <https://www.thehindu.com/news/national/another-disputed-mosque-sparks-ballabgarh-riots/article7261799.ece>.
- The Indian Express (2023, 5 February). ‘Anti-love jihad’ organisation to hold meet in Mumbai today. Diunduh dari <https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/anti-love-jihad-organisation-to-hold-meet-in-mumbai-today-8424491>.





- The News 18. (2018, 30 March). A fortnight of riots: Timeline of Bihar violence. Diunduh dari <https://www-news18-com/news/india/a-fortnight-of-riots-timeline-bihar-violence-1703919>.
- The World Bank. (2023). Population, total-India. Diunduh dari <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=IN>.
- Rahman, Khalid. (2017). Indian secularism and religious minorities: The case of muslims, *Policy Perspectives*, 14 (2): 35-53. doi: 10.13169.
- Ramachandran. Sudha. (2020). Hindutva violence in India: Trends and implications. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 12 (4): 15-20.
- Ravindra, Rudy. (2014). *International Policy Digest*. 1 (5): 55-58.
- Upadhyay, Surya Prakash & Robinson, Rowena. (2012, 8 September). Revisiting communalism and fundamentalism in India. *Economic and Political Weekly*, 47 (36): 35-57.
- Sajjad, Muhammad Waqas. (2018). Examining the state of muslim minority under Modi's BJP since 2014, *Strategic Studies*, 38 (4): 19-36.
- Soe, Hyeon Jae. (2017). Equal but not separate: India's secular dilemma equal but not separate: India's secular, *Harvard International Review*, Cambridge, 38 (4): 42-45.
- Sonia, Bhalotra, Irma Clots, Lakshmi Iyer. (2012). "Politician identity and religious conflict in India. Diunduh dari <https://www.theigc.org/sites/default/files/2014/10/Bhalotra-et-al-2012-Working-Paper.pdf>.
- Thobani, Sitara. (2019). Alt- right with the Hindu-right: Long distance nationalism and the perversion of hindutva, *Ethnic and Racial Studies*, 42 (5): 745-762. doi: doi.org/10.1080/01419870.2018.1458567.
- Waikar, Prashant. (2018). Reading islamphobia in hindutva: An analysis of Narendra Modi's political discourse, *Islamphobia Studies Journal*, 4 (2): 161-180.

